



Submitted: April 13, 2023 | Accepted: Mei 22, 2023 | Published: June 28, 2023

Dari Domestik ke Publik: Sejarah Pendidikan Kejuruan Perempuan dari Waktu ke Waktu

Mrr Ratna Endang Widuatie¹, Retno Winarni², Nurhadi Sasmita³, Dewi Salindri⁴, Zellica Vanudia Amundari⁵

^{1,2}Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, Jember, Indonesia

Email: ¹ratnaendang.sastr@unej.ac.id, ²retno.winarni@unej.ac.id, ³nurhadisasmita.sastr@unej.ac.id,

⁴dewisalindri.sastr@unej.ac.id, ⁵zelyciaamundari@gmail.com

Abstrak

Pendidikan kejuruan merupakan salah satu jenis pendidikan yang selalu menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam setiap periodenya. Secara historis, pendidikan kejuruan bagi perempuan di Indonesia dipelopori oleh dua tokoh besar, yaitu Kartini dan Dewi Sartika pada awal abad ke-20. Pendidikan kejuruan perempuan mengalami perubahan seiring dengan tuntutan kesetaraan gender karena kondisi sosial budaya di Indonesia yang semakin demokratis. Hal ini menyebabkan semakin menipisnya perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam peran sosial. Perempuan tidak lagi hanya bergelut di ranah domestik seperti halnya pemikiran Kartini dan Dewi Sartika, tetapi juga di ranah publik. Artikel ini menyoroti perjalanan sejarah pendidikan vokasi perempuan dan dinamikanya mulai dari pemikiran Kartini dan Dewi Sartika, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa kedua tokoh inilah yang memelopori lahirnya pendidikan vokasi bagi perempuan di Indonesia, sehingga perlu dianalisis apakah terdapat perbedaan pendidikan vokasi perempuan dari masa ke masa dengan pemikirannya dan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut.

Kata Kunci: SMK, Pendidikan Kejuruan, Perempuan, Kartini, Dewi Sartika.

Abstract

Vocational education is a type of education that has always been one of the main focuses of the government in each period. Historically, vocational education for women in Indonesia was pioneered by two major figures, namely Kartini and Dewi Sartika in the early 20th century. Women's vocational education has undergone changes in line with demands for gender equality due to increasingly democratic socio-cultural conditions in Indonesia. This causes the diminishing differences in the roles of women and men in social roles. Women no longer only struggle in the domestic sphere as was the case with Kartini and Dewi Sartika, but also in the public sphere. This article examines the historical journey of women's vocational education and its dynamics starting from the thoughts of Kartini and Dewi Sartika, the Old Order, the New Order, and the Reformation. The argument put forward is that these two figures pioneered the birth of vocational education for women in Indonesia, so it is necessary to analyze whether there are differences in women's vocational education from time to time with their thoughts and what causes these changes.

Keywords: SMK, Vocational Education, Women, Kartini, Dewi Sartika.

PENDAHULUAN

Artikel ini dimulai dengan penegasan istilah untuk memberikan fokus terhadap kajian pokok, yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan merupakan salah satu aspek paling penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Moses pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal. (Moses, 2012: 18-36.) Selain itu, Hamalik mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses sosial, karena berfungsi untuk memasyarakatkan anak didik melalui

sosialisasi di dalam masyarakat. (Hamalik, 2007: 23). Singkatnya, pendidikan merupakan suatu proses sosial antara beberapa orang dalam bentuk transfer pengetahuan dan berupaya untuk memajukan kemampuan seseorang dalam bermasyarakat.

Salah satu jenis pendidikan yaitu pendidikan kejuruan. Thompson dalam *Foundations of Vocational Education: Social and Philosophical Concepts* berpendapat bahwa pendidikan kejuruan dirancang untuk mengembangkan ketrampilan, kemampuan, pemahaman, sikap, kebiasaan kerja, dan penghargaan yang dibutuhkan oleh pekerja berdasarkan berguna dan produktif. (Thompson, 1973: 111).

Di Indonesia, pendidikan kejuruan tingkat awal diwujudkan dalam bentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Firdaus dan Barnawi sebagaimana dikutip oleh Purwanto dan Sukardi (2015: 93) berpendapat bahwa tujuan dari SMK yaitu: 1). Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam lingkup keahliannya. 2). Mampu memilih karier, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan lingkup keahlian yang dipilih dan ditekuni.3). Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia industri.

Meski demikian, pendidikan kejuruan bukan konsep pendidikan yang baru di Indonesia. Pendidikan kejuruan-khususnya bagi perempuan- di Indonesia di pelopori oleh dua tokoh besar, yaitu Kartini dan Dewi Sartika pada awal abad ke-20. Mereka menuangkan pemikiran mereka tentang pendidikan kejuruan dalam tulisan mereka, yaitu Kartini dalam surat-suratnya yang kemudian dibukukan dengan judul *Door Duisternis Tot Licht* atau *Habis Gelap Terbitlah Terang-* dan berbagai judul lainnya- dan Dewi Sartika dalam buku *Kautamaan Istri*. Selain dalam bentuk tekstual, pemikiran mereka juga mereka terapkan dalam sekolah yang mereka dirikan, yaitu Sekolah Kartini dan Sakola Kautamaan Istri.

Selain dua sekolah tersebut, pada saat itu pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah bercorak kewanitaan/keputrian yaitu: *Gouverments Opleding School voo Vakonderwijzeren* (OSVO) dengan lama pendidikan 4 tahun, *Gouverments Lagere Nijverheids School* (LNS) yang menerima siswa dari sekolah berbahasa Belanda (HIS), *Mevrow de Jonge School* yang menerima siswa dari sekolah berbahasa Indonesia (*Meisje Vervolg School*), *Meisje Vervolg School* yang memberikan pelajaran tentang dasar-dasar kewanitaan, Kop School yang merupakan sekolah lanjutan *Meisje Vervolg School* atau merupakan *Vervolg School* kelas II, dan *Van Deventer School* adalah sekolah guru untuk keterampilan keputrian. (Khurniawan, dkk., 2015: 10-11).

Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam pendidikan kejuruan bagi perempuan. Pemerintah Jepang tidak begitu memeringkatkan pendidikan kejuruan perempuan, melainkan pada pendidikan teknik, seuai dengan tujuan utama mereka menduduki Indonesia pada saat itu, yaitu untuk mengumpulkan sumber daya untuk perang Asia Timur Raya. Pemerintah Jepang tidak mendirikan sekolah kewanitaan/keputrian baru, melainkan hanya meneruskan dan memodifikasi sekolah kewanitaan/keputrian Belanda, seperti mengubah dan menggabungkan LNS dan *Mevrow de Jonge School* menjadi Sekolah Kependidikan Putri dengan lama pendidikan tiga tahun dan OSVO diubah menjadi Sekolah Guru Kependidikan Putri dengan lama pendidikan tiga setengah tahun. (Khurniawan, dkk., 2015: 24).

Fokus pemerintah terhadap pendidikan kejuruan bercorak kewanitaan/keputrian semakin mengalami penurunan pada masa-masa berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin berkurang hingga tidak adanya sekolah kejuruan bercorak kewanitaan/keputrian yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah. Fokus pemerintah menjadi cenderung pada reformasi pendidikan kejuruan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan sosial, salah satunya dengan mengembangkan Sekolah Teknik Menengah (STM) (Khurniawan, dkk., 2015: 30-32). STM tetap menjadi fokus pendidikan kejuruan pemerintah hingga masa Orde Baru, utamanya karena pada masa tersebut pemerintah mulai meletakkan dasar-dasar industrialisasi dalam pendidikan. (Khurniawan, dkk., 2015: 36).

Fokus pendidikan kejuruan mulai menjadi lebih beragam paling terlihat pada pasca reformasi, utamanya pada masa kepresidenan Joko Widodo dengan program “Revitalisasi SMK” dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 yaitu bahwa Revitalisasi Pendidikan merupakan upaya yang lebih cermat, lebih gigih dan lebih bertangung jawab untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Revitalisasi dalam konteks pendidikan dimaksudkan untuk memaksimalkan semua unsur pendidikan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta) yang terkait untuk peduli secara riil dalam proses pendidikan SMK. Aspek akhlak mulia, moral dan budi pekerti perlu dimasukkan dalam pengembangan kebijakan, program dan indikator keberhasilan pendidikan melalui Revitalisasi SMK. (Hadim, dkk., 2017: 10). Sama pada masa-masa sebelumnya, pada masa ini tidak ada sekolah kejuruan khusus bagi perempuan sebagaimana halnya pada masa Hindia Belanda.

Dengan demikian, terlihat adanya perubahan fokus pemerintah mengenai pendidikan perempuan dari waktu ke waktu, sehingga dapat dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, kaitan antara pemikiran Kartini dan Dewi Sartika dengan pendidikan kejuruan masa-masa selanjutnya dan apakah pemikiran Kartini dan Dewi Sartika mampu menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan kejuruan pada masa kini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Menurut Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. (Gottschalk, 1975:32). Adapun tahap-tahap dari metode penelitian ini antara lain:

1. Heuristik

Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang dianggap relevan dengan topik yang dipilih. Cara yang dapat dilakukan yaitu mencari dan mengumpulkan sumber, buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun tahap heuristik dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan studi karsipan untuk menemukan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini. Penelitian dilakukan dengan mencermati sumber-sumber tertentu, mencari, menelaah buku-buku, artikel atau sumber lain yang berkaitan dengan Kartini dan Dewi Sartika. Adapun sumber untuk mengetahui mengenai pemikiran Kartini dan Dewi Sartika digunakan buku berjudul *Surat-Surat Kartini Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya* (1979) yang merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari *Door Duisternis tot Licht (DDTL)* dan diterjemahkan oleh Sulastin Sutrisno dan *Kautamaan Istri* (2020), buku terjemahan bahasa Indonesia dari karya Dewi Sartika dengan judul yang sama oleh Chye Retty Isnendes dan Nugraha Soekari.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah liberal tentang pendidikan, data diperoleh dari beberapa sumber, seperti Lembaran Negara (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*), surat kabar(*handelsblad*), dan buku-buku seperti: *Colonial Policy Volume II The Dutch Indies* karya A.D.A. De Kat Angelino, *Netherlands India A Study of Plural Economy* karya JS. Furnivall, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia* karya Koentjaraningrat, dan *Sejarah Pendidikan Indonesia* karya S. Nasution.

Selain itu, diperlukan juga pengumpulan data berkaitan dengan dampak dan pengaruh emikiran Kartini dan Dewi Sartika terhadap pendidikan kejuruan di Indonesia. Data tersebut diperoleh dari beberapa sumber, seperti buku berjudul Thompson, John. F. 1973. *Foundations of Vocational Education: Social and Philosophical Concepts* karya John. F. Thompson, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* karya Oemar Hamalik, Khurniawan, *SMK dari Masa ke Masa* karya Arie Wibowo Khurniawan, dan *Implementasi Revitalisasi SMK*. Karya Hadam Sampurn. Selain itu, juga digunakan data yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperdalam analisis.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah proses memilah dan menyaring keotentikan dan kredibilitas sumber-sumber yang telah ditemukan. Pada tahap ini penulis melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber yang didapat untuk memperoleh kebenaran sumber. Sebagai sebuah studi pustaka sehingga sebagian besar sumber yang digunakan berupa sumber sekunder dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, dengan demikian, penulis tidak melakukan kritik eksternal. Adapun kritik internal yang dilakukan yaitu dengan menelaah latar belakang penulis sumber-sumber yang digunakan untuk mengetahui kredibilitas sumber.

3. Interpretasi

Interpretasi yaitu memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh melalui kritik dengan cara menghubungkan satu sama lainnya. Dalam melakukan interpretasi, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu menggunakan bantuan dari disiplin ilmu lain, yaitu antropologi budaya. Dengan antropologi budaya, penulis dapat mendapatkan gambaran mengenai kondisi budaya yang mengelilingi kehidupan Kartini dan Dewi Sartika berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan karya serta kehidupan mereka.

4. Historiografi

Historiografi yaitu tahap terakhir dalam penulisan sejarah. Pada tahapan ini penulis menyajikan hasil temuan dengan cara menyusun dalam bentuk tulisan yang jelas dengan gaya bahasa yang sederhana menggunakan bahasa yang baik dan benar dan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah disusun.

Kebijakan Pemerintah Liberal Tentang Pendidikan

Pelaksanaan politik liberal ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria (*Agrarische Wet*) pada April 1870 dan diumumkan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie*) No. 55 Tahun 1870 (Furnivall, 2010: 219). Pada masa ini pendidikan ditujukan kepada pengembangan kemampuan intelektual, nilai-nilai rasional dan sosial, serta usaha mencapai tujuan-tujuan sekuler lainnya. Kurikulum sekolah rendah tidak lagi hanya meliputi pelajaran tradisional seperti membaca, menulis, dan berhitung, melainkan juga meliputi pelajaran-pelajaran baru seperti geografi, sejarah, dan pelajaran sekuler lainnya (Nasution, 2014: 9-10).

Pada masa ini terdapat sekolah Eropa yang menerima anak-anak Bumiputra sebagai muridnya, yaitu *Europeesche Lagere School* (ELS). Sekolah ini merupakan peninggalan masa *cultuurstelsel* yang tujuan utama didirikannya adalah untuk mempersiapkan anak didik menjadi pegawai administrasi di kantor pemerintah atau di perusahaan-perusahaan Belanda (Makmur, dkk., 1993: 61-62). Meski begitu, tidak berarti semua masyarakat Bumiputra bersekolah, melainkan hanya mereka yang hendak bekerja di pemerintahan dan swasta. Orang tua yang menginginkan anaknya untuk bersekolah belum tentu bisa menyekolahkan anaknya, karena mereka membutuhkan anak-anak mereka untuk membantu pekerjaan mereka (Anonim, dalam *Bataviaasch Handelsblad*, 27 Desember 1862: 4). Hal tersebut menandakan bahwa biaya sekolah yang tinggi menyebabkan hanya mereka yang berasal dari keluarga bangsawan dan kaya yang mampu bersekolah di sekolah negeri seperti ELS.

Selanjutnya, dikeluarkan keputusan raja yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 125 tahun 1892 yang merupakan landasan terjadinya reorganisasi pada pendidikan dasar. Berdasarkan keputusan tersebut, sekolah negeri Bumiputra dibagi menjadi dua kelas, yaitu *Eerste Klasse School* (EKS) atau Sekolah Kelas Satu dan *Tweede Klasse School* (TKS) atau Sekolah Kelas dua. EKS diperuntukkan bagi anak bangsawan dan orang kaya, sedangkan TKS diperuntukkan bagi anak Bumiputra pada umumnya (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1893, No. 125: 1).

Meski telah didirikan sekolah bagi golongan Bumiputra, kesetaraan pendidikan antara golongan Bumiputra dan Eropa di Hindia Belanda belum tercapai. Pendidikan di EKS masih kurang untuk kelas atas, sedangkan kurikulum di TKS masih belum bisa dicerna bagi masyarakat kelas bawah. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh sedikitnya buku pelajaran yang berbahasa lokal dan bahasa Melayu-bahasa yang digunakan sebagai media pembelajaran. Dua bahasa tersebut digunakan dalam kurikulum pembelajaran lima tahun di Sekolah Kelas Satu, meliputi mata pelajaran aritmatika, sejarah lokal, geografi, sejarah alam, menggambar, dan survey. Mata pelajaran tersebut tidak dapat mengimbangi pembelajaran di sekolah Belanda. Pelajaran di EKS tidak cukup untuk menempuh ujian *kleinambtenaar* (pegawai rendah), sehingga banyak orang tua yang berupaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah Eropa (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984: 16). Keinginan mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Eropa semakin sulit untuk dicapai, salah satunya karena kemudian dikeluarkan kebijakan bahwa sekolah-sekolah Eropa hanya menerima anak-anak yang mampu berbahasa Belanda dengan fasih (Angelino, 1931: 205-206). Dengan begitu, dapat diketahui bahwa anak-anak Bumiputra sebenarnya tidak pernah dilarang untuk masuk sekolah negeri bagi anak-anak Eropa. Meski demikian, terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak banyak anak Bumiputra yang memiliki kesempatan tersebut, seperti penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan tingginya biaya sekolah sehingga tidak banyak orang tua Bumiputra yang mampu menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri (koentjaraningrat, 1984: 78).

Selain itu, pendidikan Eropa kurang meresap dan dianggap kurang penting bagi perempuan. Perempuan hanya dianggap sebagai alat pendamping suami dalam bergaul dengan para pejabat belanda, seperti saat ada perjamuan, menerima tamu, dan sebagainya (Soekiman, 2014: 59). Pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa pendidikan lebih berhak didapatkan oleh kaum laki-laki, karena saat itu profesi yang diperlukan umumnya diisi oleh kaum laki-laki, seperti tentara dan tenaga ahli, misalnya ahli bedah atau insinyur pertambangan (Isnaeni, 2015). Hingga penghujung abad ke-19, anak perempuan Bumiputra berkesempatan sangat kecil untuk dapat menempuh pendidikan formal. Pada tahun 1890, jumlah murid Indonesia di E.L.S adalah 808 orang, hanya 6.5% dari jumlah murid keseluruhan, yaitu 12.377 orang, dan murid perempuan Indonesia hanya hampir seperlimanya (Nasution, 2014: 105).

Pada masa ini, lahir dua tokoh pemikir perempuan yaitu Kartini dan Dewi Sartika. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah (Hassan, 2004: 195), sedangkan Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung (Wiriaatmadja, 1986: 4). Kartini merupakan anak dari R.M.A.A. Sosroningrat, Bupati Jepara (Reksonegoro, 1958: 10). Dewi Sartika merupakan anak dari Raden Somanagara, Patih Bandung. (Asura, 2019: 12). Sebagai keturunan bangsawan, mereka memiliki kesempatan lebih untuk dapat menempuh pendidikan formal di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah..

Pada tahun 1885 Kartini dimasukkan ke Sekolah Rendah Belanda atau *Europesche Legere School* (ELS) satu-satunya sekolah yang ada di kotanya (Kartini, 1979: 2). Dewi Sartika bersekolah di Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse School*) hanya hingga ia duduk di kelas 2B yang disebabkan oleh pengasingan ayahnya ke Ternate dan ibunya memilih untuk menemani ayahnya atas tuduhan pemasangan dinamit pada pertengahan Juli 1893 dalam acara penyambutan R.A.A. Martanegara sebagai bupati Bandung yang baru (Wiriaatmadja, 1986: 43).

Pendidikan Perempuan Menurut Kartini dan Dewi Sartika

Kartini dan Dewi Sartika menganggap pendidikan sebagai sarana emansipasi perempuan Bumiputra. Secara tekstual, pemikiran-pemikiran Kartini tertuang dalam surat-surat yang ia tulis yang kemudian dibukukan dengan judul *Door Duisternis tit Licht (DDTL)* yang diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh N.V. Electrische Drukkerij “Luctor et Emergo” di Belanda pada April 1911. Setahun kemudian muncul cetakan kedua dan ketiga. Sementara cetakan keempat atau cetakan terakhir dari penerbit itu baru muncul pada 1923 (Aryono, 2017). Buku tersebut memuat sebanyak 61 dari 105 pucuk surat yang terkumpul di tangan Mr J.H. Abendanon, Direktur Pendidikan, Ibadah, dan Kerajinan pada masa Pemerintah Otonomi Hindia Belanda (Arbaningsih, 2005: 1). Di sisi lain, pemikiran Dewi Sartika secara tekstual ia tuangkan dalam bukunya berjudul *Kaoetamaan Istri* yang pertama kali diterbitkan oleh Nix & Co dan bekerja sama dengan Commissie voor de Volkslectuur (Batavia) pada tahun 1912. Buku tersebut ditulis dalam bahasa Sunda dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Chye Retty Isnendes dan Nugraha Soekari pada tahun 2020.

DDTL dan *Kaoetamaan Istri* sama-sama memuat pemikiran-pemikiran Kartini dan Dewi Sartika tentang pendidikan perempuan. Terdapat beberapa persamaan antara pemikiran mereka, salah satunya yaitu pendapat bahwa ibu merupakan pendidik pertama. Kartini menuliskan: “Dari perempuanlah manusia itu pertama-tama menerima pendidikan. Di pangkuhan perempuanlah seseorang mulai belajar merasa, berpikir, dan berkata-kata. [...] Dan bagaimakah ibu-ibu Bumiputra dapat mendidik anak-anaknya, kalau mereka sendiri tidak berpendidikan?” (Kartini, 1979: 91). Dewi Sartika menuliskan: “kalau keinginan kita setiap manusia juga sama, ingin memiliki anak yang sehat dan baik. Tapi [*sic!*] bagaimana caranya agar begitu? Tidak ada jalan lain selain ibunya harus memiliki pengetahuan, punya wawasan, banyak kemampuan, ya harus sekolah.” (Sartika, 2020: 73)

Kartini dan Dewi Sartika berpendapat bahwa pendidikan secara umum merupakan alat untuk memajukan perempuan. Menurut Dewi Sartika, pengajaran adalah pengetahuan atau sarana untuk berbenah, memperbaiki diri dan meningkatkan segala macam permasalahan (Sartika, 2020: 55-56). Lebih lanjut, Dewi Sartika mengatakan bahwa cara terbaik untuk memajukan masyarakat adalah dengan memberikan mereka ruang berupa sekolah (Sartika, 2020: 54). Hal tersebut juga ia tuliskan dalam artikelnya yang dimuat di *“Onderzoek naar de oorzaken van de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera”* (Penelitian tentang penyebab menurunnya kesejahteraan penduduk asli di Jawa dan Madura.) yaitu “Selain dibesarkan dengan baik, dia harus dilatih dengan benar. Perluasan pengetahuan akan mempengaruhi [*sic!*] moral wanita Pribumi. Ia hanya memperoleh ilmu itu di sekolah.” (Sartika, 1914: 21)

Ia berpendapat bahwa pendidikan dan pengajaran yang baik akan menghasilkan individu yang baik pula, utamanya jika diberikan sejak usia dini sebagaimana ia tuliskan: “Jadi kalau bangsa kita diberi tuntunan sebagai mana [*sic!*] mestinya, diberi pengajaran yang baik, dinasihati sedari usia kanak-kanak, maka sikapnya juga akan menjadi baik, pilihannya benar, dan pikirannya lebih terang.” (Sartika, 2020: 56). Dari situ Dewi Sartika memiliki konsep tentang kepandaian, yaitu bahwa seseorang yang mandiri tidak akan menyulitkan orang lain dan hal tersebut merupakan ciri-ciri orang yang pandai (Sartika, 2020: 56). Kemandirian perempuan salah satunya terwujud dalam kemampuannya untuk mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi perempuan selalu mengalami perubahan, termasuk mengenai pendidikan. Masalah pendidikan yang mendorong lahirnya keinginan Dewi Sartika untuk memajukan pendidikan perempuan yang utama yaitu rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak perempuannya yang menyebabkan rendahnya pula minat perempuan untuk bersekolah. Rendahnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak perempuannya disebabkan oleh sedikitnya lapangan pekerjaan yang ditujukan bagi perempuan. Hal lain yang memperburuk pandangan masyarakat Bumiputra tentang pendidikan perempuan adalah telah ditanamkannya stigma bahwa perempuan sebaiknya di rumah saja dan pekerjaan yang baik sebagian besar ditujukan bagi kaum laki-laki yang menyebabkan rendahnya keinginan anak-anak perempuan untuk bersekolah. Berdasarkan masalah tersebut, Dewi Sartika berpendapat bahwa keterampilan merupakan salah satu bekal hidup yang paling penting dan diperlukan agar perempuan dapat mandiri dan memiliki pekerjaan, secara tidak langsung berkemungkinan untuk meningkatkan minat belajar dan menamatkan sekolah di kalangan perempuan. Dengan pendidikan, perempuan sebagai ibu akan mampu mengajar anak-anaknya dengan lebih baik (Dewi Sartika, 2020: 65-66).

Berbeda dengan Dewi Sartika yang memiliki konsep tentang kepandaian, Kartini memiliki konsep tentang kecerdasan yaitu: “kecerdasan otak saja tidak berarti segala-galanya. Harus ada kecerdasan lain yang lebih tinggi, yang erat berhubungan dengan yang lain untuk mengantarkan orang ke arah yang ditujunya. Di samping otak, juga hati harus dibimbing, kalau tidak demikian peradaban hanya tinggal pada permukaan saja” (Kartini, 1979: 126).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Secara etimologis pandai berasal dari bahasa Sansekerta “*pandita*” yang berarti bijak, terampil, dan pandai. Di sisi lain, cerdas berarti sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran. Kecerdasan berarti kesempurnaan perkembangan akal budi. Dengan begitu dapat diketahui bahwa Dewi Sartika mengutamakan kepandaian, yang salah satunya berarti keterampilan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemikirannya tentang pendidikan perempuan berfokus pada pendidikan keterampilan. Di sisi lain, Kartini mengutamakan kecerdasan. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Kartini memberi penekanan akan pentingnya budi pekerti bagi perempuan.

Berkaitan dengan kecerdasan yang lain yang berkaitan dengan hati, Kartini-sama dengan Dewi Sartika sering menuliskan betapa pentingnya pendidikan budi pekerti menurut Kartini budi pekerti merupakan hal yang sangat vital dalam pendidikan. Budi pekerti tidak hanya merupakan salah satu tujuan akhir dari pendidikan, melainkan juga awal dari pendidikan. Seorang guru harus memiliki budi pekerti, tidak hanya murid. Selain itu, Kartini juga mengkritik keadaan pendidikan pada saat itu yang tidak mengutamakan pendidikan budi pekerti, melainkan kecerdasan intelektual semata. Menurutnya, hal tersebut melahirkan orang-orang yang tidak beradab, cerdas secara intelektual, namun tidak berbudi pekerti sehingga mereka banyak melakukan perbuatan tidak baik-meski berpendidikan (Kartini, 1979: 90-91). Dengan begitu, pelajaran tentang budi pekerti harus diberikan dalam sekolah (Kartini, 1979: 311).

Adapun tujuan akhir pendidikan menurut Dewi Sartika tidak hanya agar dapat menulis, membaca, dan berhitung sebagaimana pikiran masyarakat pada umumnya, melainkan untuk memenuhi keperluan keutamaan hidup, yaitu ntuk menghasilkan manusia yang berguna, menurut pribahasa *cageúr-bagéur, cepet, bener*, baik perempuan maupun laki-laki (Sartika, 2020: 83). *Cageúr*, berarti sehat dan *bagéur* berarti bagus. Sehat yang dimaksud adalah sehat secara jasmani dan rohani. Kesehatan tidak secara fisik, melainkan juga secara mental. Seseorang harus mampu membedakan antara baik dan buruk, menyadari apa kebutuhannya dan apa yang berpotensi menyulitkan hidupnya (Sartika, 1914: 21). *Cepet* berarti cepat. Dan terakhir, *bener* yaitu beriman, jujur, adil, jelas serta lurus visi dan misi hidupnya (Sudaryat, 2012: 108).

Sekolah Kejuruan Pra-Kemerdekaan

1. Sekolah Kartini

Pada tahun 1903 Kartini mendirikan sekolah bagi perempuan Bumiputra pertama di Jepara, tepatnya di halaman belakang rumah ayahnya. Sekolah ini diisi oleh anak-anak *priayi*. Bersama dengan adik-adiknya, Kartini mengajarkan siswa-siswanya cara membaca dan menulis, baca-tulis, budi pekerti, kerajinan tangan, dan memasak. Selain dalam bentuk sekolah, Kartini juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya, Salah satunya dengan menggalakkan beberapa cabang kerajinan seni di Jepara, seperti kulit penyu, perempuan tukang dringin (sutera bersulam benang emas untuk sabuk), dan tukang emas (Kartini, 1979: 316).

Setelah menikah dengan Adipati Djojoadiningrat, bupati Rembang, Kartini pindah ke Rembang. Di sana ia juga mendirikan sekolah di rumahnya. Pada tahun 1903 sekolahnya tersebut telah memiliki 9 orang murid (Kartini, 1979: 334). Murid-murid di sekolah ini tidak hanya diberikan pelajaran seperti yang diajarkan pada sekolah negeri, tetapi juga diberi pelajaran menjahit, merajut, memasak, dan berbagai hal yang menjadi keperluan seorang perempuan. Semua pelajaran itu diberikan secara gratis (Reksonegoro, 1958: 28).

Kartini berusaha untuk mengembangkan sekolahnya supaya dapat menampung dan mengajar lebih banyak murid. Pada akhir 1903 telah ada dua tiga orang tua yang menyerahkan anaknya untuk ia didik. Selain itu, Kartini juga mengungkapkan harapannya untuk mendapat subsidi dari pemerintah apabila sekolahnya berjalan dengan baik. Ia berharap pada Januari 1904 sekolahnya dapat dibuka dan mendapatkan guru perempuan untuk mengajar di sekolah tersebut. Selama belum ditemukan guru yang sesuai, Kartini yang akan mengajar dan adik-adiknya akan menggantikannya apabila ia berhalangan. (Kartini, 1979: 350).

Kartini tetap aktif mengajar di sekolahnya bahkan ketika ia sedang sakit-sakitan saat mengandung. Ia tetap menulis surat kepada Nyonya R.M. Abendanon-Mandri yang di dalamnya meliputi tulisan tentang sekolahnya. Pada 30 Juni 1904 Kartini menuliskan bahwa saat itu sekolahnya telah memiliki 12 orang

murid, beberapa di antaranya orang dewasa (Kartini, 1979: 358). Setelah surat tersebut, Kartini mengirimkan dua surat terakhirnya sebelum ia meninggal pada 13 September 1904 kepada Nyonya R.M. Abendanon-Mandri, yaitu pada 24 Agustus dan 7 September 1904.

2. Sakola Kaoetamaan Istri

Sama halnya dengan Kartini, Dewi Sartika juga mewujudkan pemikirannya tentang pendidikan perempuan secara praktis dalam bentuk sekolah. Keinginan Dewi Sartika untuk memajukan pendidikan perempuan Bumiputra berawal dari keadaan perempuan di sekitarnya yang memprihatinkan sehingga menumbuhkan benih-benih pemikiran tentang pendidikan perempuan.

Dewi Sartika mulai merealisasikan keinginannya untuk memajukan pendidikan perempuan Bumiputra, yaitu dengan yaitu dengan mengajar perempuan-perempuan dalam keluarganya di sebuah ruangan di belakang rumah ibunya. Adapun yang ia ajarkan yaitu merenda, menyulam, merancang dan tata bahasa (Dewi Sartika, 2020: 62). Kegiatan mengajar tersebut diketahui oleh C. Den Hamer, inspektur pengajaran Hindia Belanda di Bandung. Awalnya, Den Hamer mencurigai dan menganggap kegiatan tersebut sebagai kegiatan liar, terutama mengingat rekam jejak ayah Dewi Sartika. Den Hamer memutuskan untuk mengunjungi rumah ibu Dewi Sartika untuk melihat langsung kegiatan tersebut. Kunjungan tersebut mengubah pandangan Den Hamer. Ia melihat bahwa kegiatan tersebut berdampak positif bagi perempuan Bumiputra, sehingga ia menyuruh Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah. Dukungan Den Hamer ternyata tidak cukup, karena banyak anggota keluarga Dewi Sartika yang berasal dari golongan menak menentang ide tersebut karena mereka menganggapnya tidak sesuai dengan adat Sunda. Selanjutnya Den Hamer menyarankan Dewi Sartika untuk meminta bantuan kepada bupati Bandung (Daryono, 2008: 55-56).

Pertentangan yang dilakukan oleh masyarakat dan *menak* menyebabkan sempat tidak disetujuinya niat Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah perempuan oleh bupati Bandung, Raden Adipati Aria Martanegara. Akan tetapi, setelah melihat kegigihan Dewi Sartika, bupati Martanegara menyetujui pendirian sekolah perempuan tersebut. Sekolah yang pertama kali dibuka, yaitu Sakola Istri (Sekolah Gadis) pada 16 Januari 1904 yang terletak di Paseban sebelah barat depan kabupaten. Sekolah tersebut mendapat dukungan dari inspektur sekolah C. den Hamer dan persetujuan Bupati Martanegara. Pada tahun pertama, terdapat tiga orang pengajar, yaitu: Dewi Sartika, Ibu Purma dan Ibu Uwit. Sekolah ini menerima siswa tidak hanya yang berasal dari kalangan *menak*, melainkan dari keluarga biasa yang kebanyakan merupakan pegawai-pegawai di kantor Kabupaten Bandung yang berpenghasilan rendah saja. Hal ini akan merupakan prinsip yang dipegang oleh Dewi Sartika, bahwa sekolahnya akan terbuka bagi siapa saja yang membutuhkannya (Wiriaatmadja, 1986: 68).

Pada tahun pertama, sekolah ini memiliki 60 siswa dan tiga orang guru (Sartika, 2020: 61). Pada tahun 1906 Dewi Sartika menikah dengan seorang guru bernama R. Kd. Agah Suriawinata yang mendukung Dewi Sartika dan Sakola Istri. Sekolah ini yang kemudian berganti nama menjadi "Sakola Kaoetamaan Istri" pada tahun 1910. (Sartika, 2020: 67). Sekolah ini mengalami perkembangan, dan pada tahun 1911 telah memiliki tempat sendiri dan muridnya terdiri atas 216 siswi putri (Anonim, dalam *Algemeen Handelsblad*, 26 September 1911: 5) dan dua murid pertamanya lulus pada tahun yang sama (Anonim, dalam *Deli Courant*, 11 Oktober 1911: 2). Pada tahun 1913 Sakola Kautamaan Istri memiliki 260 siswi (Anonim, dalam *De Express*, 13 Februari 1913: 3). Dengan begitu, Sakola Kaoetamaan Istri yang kedua, karena satu sekolah saja tidak mampu menampung jumlah siswa yang meningkat. Pada tahun-tahun selanjutnya dibukalah Sakola-Sakola Kaoetamaan Istri lainnya di kota-kota Pasundan dan Sumatra, antara lain di Garut pada tahun 1912 (Anonim, dalam *De Preanger Bode*, 8 Juni 1912: 2); Tasikmalaya pada tahun 1913 (Anonim, dalam *De Preanger Bode*, 13 Februari 1913: 1); Padangpanjang tahun 1915 (Anonim, dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 7 Oktober 1915: 1); Cianjur, tahun 1916 (Anonim, dalam *De Preanger Bode*, 28 September 1916: 1); dan; Sukabumi, tahun 1926 (Anonim, dalam *Bataviaasch Nieuwsblad*, 9 Juni 1926: 1) Melalui sekolah tersebut, Dewi Sartika bertujuan untuk mencetak anak didik yang *cageur-bageur, cepet*, serta harus berani memperjuangkan kebenaran yang diyakininya, jangan mudah putus asa, dan harus melangkah lebih jauh serta tidak mengeluh dalam setiap keadaan (Sartika, 2020: 86).



Gambar 1 Salah satu contoh Sakola Kaoetamaan Istri: Bandung, Tahun 1920-an

Sumber: Koleksi Digital Universitas Leiden, “De Inlandsche Meisjesschool Kaoetamaan Istri te Bandoeng”, [online] <http://hdl.handle.net/1887.1/item:909410>

Dewi Sartika menuliskan bahwa hasil akhir dari sekolah yang diharapkan adalah siswa-baik perempuan maupun laki-laki- mampu menjadi manusia yang berguna, menurut pribahasa *cageur, bageur, cepet, bener*. Dengan begitu, tidak cukup siswa diberikan pelajaran pokok menulis, membaca, dan berhitung saja, melainkan diperlukan pelajaran lain yang diperlukan untuk keutamaan hidup manusia, yaitu: Kebersihan diri, tata tertib, bahasa,disiplin, patuh, bahagia, baik hati, hemat, dan berpikir (Sartika, 2020: 84-85).

Selanjutnya, berkaitan dengan Sakola Kaoetamaan Istri di Bandung ditambahkan tiga macam pendidikan untuk yaitu:

1. Kerajinan perempuan seperti: menyulam, menyongket, merenda, *ngabere*, membongkar beserta menjahit pakaian, membuat kembang kertas, menggambar, dan banyak lagi selain itu.
2. Kerumahtanggaan, seperti: hal berbenah, menata cucian kering dan melipatnya serta menyentrika pakaian, mencuci dan membersihkan perabot, menata pekarangan rumah dan mengurus makanan.
3. Memasak: belajar membuat berbagai resep masakan termasuk masakan yang biasa kita makan.(Sartika, 2020: 85-86)

Pendidikan Kejuruan Pasca Kemerdekaan

Pendidikan Kejuruan Pada masa Hindia Belanda dan pendudukan Jepang, pemerintah mengadakan sekolah kejuruan khusus bagi perempuan. Hal tersebut tidak ditemukan pada masa-masa selanjutnya. Sejak masa kemerdekaan, tidak ada lagi sekolah kejuruan bercorak kewanitaan/keputrian. Pada masa Orde Lama, kebijakan-kebijakan pendidikan diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Mengenai kejuruan disebutkan dalam pasal 7 No. 3. yaitu pendidikan dan pengajaran menengah (umum dan Fakultas Kejuruan) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat, dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi. (Rifa'I, 2020: 160-161). Pada masa ini, pendidikan kejuruan difokuskan pada bidang hukum dan dokter. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya jumlah tenaga ahli dalam bidang-bidang tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh Drs. Moh. Hatta yang menemukan bahwa dari peluang sekitar 600 ahli hukum yang diperlukan hanya 100 orang yang tersedia, dan bagi 1600 dokter yang dibutuhkan hanya tersedia kurang lebih 800 orang. Selain itu, juga diperlukan pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang lebih krusial dalam bidang rekayasa, yaitu tenaga insinyur. (Khurniawan, 2015: 29). Selanjutnya, pada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pendidikan kejuruan dalam bidang ekonomi dan teknik. Sebelum tahun 1969 telah ada 126 Sekolah Teknik Menengah (STM) di samping 56s Sekolah Teknik (ST). Selain itu, telah tersedia 224 Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), 389 Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), 47 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA), dan 201 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP). (Khurniawan, 2016: 31-32). Selanjutnya setelah masa Orde Baru dan pasca reformasi

fokus pemerintah berkaitan dengan pendidikan kejuruan adalah untuk menyiapkan pendidikan kejuruan sesuai dengan permintaan dunia kerja yang merupakan salah satu dari kebijakan pendidikan nasional pada tahun 2006. (Rifa'i, 2020: 274).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sekolah-sekolah kejuruan yang ada sejak awal kemerdekaan hingga pasca reformasi pada umumnya berfokus terhadap bidang kejuruan teknik dan ekonomi yang secara sosio-kultural diidentikkan dengan kaum laki-laki. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan yang antara jumlah siswa perempuan dan laki-laki di sekolah kejuruan, seperti yang terjadi pada tahun 1986, di mana jumlah siswa laki-laki di SLTP dan SLTA kejuruan yaitu sebanyak 996.181 orang, sedangkan jumlah siswa perempuan hanya sebanyak 644.339 orang. (Biro Pusat Statistik, 1987: 88). Hal serupa juga terjadi pada satu dekade selanjutnya, yaitu pada tahun 1997 dan 2007, di mana jumlah siswa perempuan di sekolah kejuruan jauh lebih kecil daripada jumlah siswa laki-laki, yaitu 1.148.309 siswa laki-laki dan 922.296 siswa perempuan. (Badan Pusat Statistik, 1998: 89).

Kondisi pendidikan kejuruan secara umum mulai mengalami peningkatan pada Periode I kepresidenan Joko Widodo yang secara resmi dimulai sejak 20 Oktober 2014. Fokus pendidikan pada pemerintahan ini adalah pendidikan kejuruan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan begitu, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah kejuruan (SMK). Implementasi program revitalisasi SMK salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah SMK, baik negeri maupun swasta setiap tahun ajarnya sejak tahun ajaran 2016/2017 hingga 2018/2019. Adapun keberhasilan program ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah siswa SMK pertahunnya, yaitu: 1). Siswa laki-laki: 4.750.728 orang (2016/2017), 4.930.655 orang (2017/2018), dan 5.041.592 orang (2018/2019); 2). Siswa perempuan: 4.591.827 orang (2016/2017), 4.757.021 orang (2017/2018), dan 4.812.741 orang (2018/2019) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, 2018, dan 2019). Berdasarkan data tersebut diketahui peningkatan jumlah siswa laki-laki lebih banyak dari siswa perempuan, yaitu meningkat sebesar 3.79% pada tahun ajaran 2017/2018 dan 2.25% pada tahun ajaran 2018/2019, sedangkan jumlah siswa perempuan hanya meningkat sebesar 3.6% pada tahun ajaran 2017/2018 dan 1.17% pada tahun ajaran 2018/2019).

Pada periode I kepresidenan Joko Widodo, terdapat pembagian bidang kejuruan yang terstruktur. Akan tetapi, sebagian besar bidang keahlian tersebut merupakan bidang keahlian yang secara konvensional tidak ditujukan bagi kaum perempuan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018, daftar bidang keahlian di SMK yaitu: 1). Teknologi dan Rekayasa, 2). Energi dan Pertambangan, 3). Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, 4). Agribisnis dan Agroteknologi, 5). Kemaritiman, 6). Bisnis dan Manajemen, 9). Pariwisata, 10). Seni dan Industri Kreatif. Secara kultural, hanya beberapa bidang kejuruan dalam daftar tersebut yang secara konvensional ditujukan utama kepada kaum perempuan, yaitu: Kesehatan dan Pekerjaan Sosial dan Seni dan Industri Kreatif.

Sedikitnya bidang kejuruan yang ditujukan bagi perempuan cenderung mendapatkan bahwa bidang-bidang tersebut tidak dianggap penting. Secara langsung hal tersebut menyebabkan rendahnya minat perempuan untuk bersekolah di SMK daripada di Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, di sebagian besar SMK, pelajaran mengenai hal-hal yang tidak secara langsung berkaitan dengan bidang keahliannya sering kali diabaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah. Ujian Nasional adalah salah satu indikator dari 8 Standar Nasional Pendidikan. Kemendikbud memfokuskan nilai dan hasil kelulusan Ujian Nasional menjadi pemanfaatan berbagai indikator kinerja yang ditangkap oleh berbagai alat ukur untuk meningkatkan mutu pendidikan. (Kemendikbud, 2015: 4). Adapun rata-rata nilai UN sekolah menengah dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yaitu 58.186 (SMA) dan 53.218 (SMK). (Kemendikbud, 2015,2016,2017,2018,2019). Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai UN SMK lebih kecil dari SMA.

Selain dari nilai UN, keberhasilan sistem pendidikan juga dapat dilihat dari tenaga kerja, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam Laporan Ketenagakerjaan Indonesia tahunan yang dirilis oleh BPS. Per Agustus 2017, TPT untuk SMK paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 11,41% (Badan Pusat Statistik, 2017: 1). Pada Agustus 2018 TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,24 %. (Badan Pusat Statistik, 2018: 1). Pada Agustus 2019, SMK juga masih memiliki TPT tertinggi, yaitu sebesar 10.42%. (Badan Pusat Statistik, 2019: 3). Meskipun dalam tiga tahun tersebut TPT SMK selalu menjadi yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lainnya, dapat terlihat bahwa terdapat penurunan TPT secara gradual setiap tahunnya.

Selain TPT, terdapat pula Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Pada Agustus 2017, TPAK laki-laki sebesar 82,51 % sementara TPAK perempuan hanya sebesar 50,89%. (Badan Pusat Statistik, 2007:2). Pada Agustus 2018, TPAK laki-laki sebesar 82,69 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 51,88% (Bapan Pusat Statistik, 2018: 2). Pada Agustus 2019, TPAK laki-laki sebesar 83,13%, sedangkan TPAK perempuan sebesar 51,89%. (Badan Pusat Statistik, 2019: 2). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun TPAK perempuan meningkat setiap tahunnya, masih terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara besar TPAK laki-laki dan TPAK perempuan.

BPS juga merilis data mengenai upah buruh berdasarkan jenis pendidikan terakhir yang ditamatkan sejak tahun 2018. Pada tahun tersebut upah buruh laki-laki tamatan SMK sebesar Rp. 2.25juta, sedangkan upah buruh perempuan tamatan SMK sebesar Rp. 2.29juta. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan cukup signifikan pada rata-rata upah buruh laki-laki tamatan SMK yaitu dari Rp. 2.25juta pada tahun 2018 menjadi Rp. 3.09juta. (Badan Pusat Statistik, 2018: 9). Di sisi lain, pada tahun 2019 tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada rata-rata upah buruh perempuan tamatan SMK, yaitu hanya meningkat dari Rp. 2.29juta pada tahun 2018 menjadi Rp. 2.34juta pada tahun 2019. (Badan Pusat Statistik, 2019: 15).

Ketimpangan antara besaran upah buruh laki-laki dan perempuan tamatan SMK merupakan salah satu hal yang berpotensi menyebabkan lebih rendahnya minat perempuan untuk bersekolah di SMK. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa revitalisasi SMK-sebagaimana disebutkan dalam 6 paragraf sebelumnya-berhasil meningkatkan jumlah siswa perempuan di SMK-walaupun tidak sebesar jumlah peningkatan siswa laki-laki. Peningkatan jumlah siswa perempuan menandakan bahwa secara umum perempuan Indonesia telah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan kejuruan. Hal tersebut secara historis tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran dua tokoh besar yang memperjuangkan pendidikan-utamanya pendidikan kejuruan- bagi perempuan Indonesia, yaitu Kartini dan Dewi Sartika.

Dua tokoh di atas memiliki pemikiran bahwa perempuan harus memiliki keterampilan khusus. Pemikiran tersebut mereka terapkan dalam sekolah mereka- Sekolah Kartini dan Sekolah Kautamaan Istri. Kartini menuliskan “Saya hendak menekuni bahasa Belanda sungguh-sungguh, menguasainya dengan sempurna, agar dapat berbuat dengan bahasa itu semau saya. Dan saya akan mencoba dengan pena saya menumbuhkan perhatian mereka, yang dapat memberi bantuan dalam usaha kamu untuk memperbaiki nasib perempuan Jawa.” (Kartini, 1979: 41). Dewi Sartika juga menuliskan pendapatnya tentang tata bahasa dalam bukunya *Kautamaan Istri* bahwa ia mengajarkan murid-muridnya merenda, menyulam, merancang dan tata bahasa. (Sartika, 2020: 62).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada periode I kepresidenan Joko Widodo terjadi peningkatan jumlah siswa perempuan di SMK. Akan tetapi, terdapat perbedaan kurikulum dalam bentuk mata pelajaran antara SMK pada masa tersebut dengan Sekolah Kartini dan Sekolah Kautamaan Istri. Dua sekolah tersebut memang tidak memiliki sistem penjurusan seperti pada periode I kepresidenan Joko Widodo, akan tetapi, sekolah mereka berfokus terhadap keterampilan-keterampilan yang ditujukan untuk kaum perempuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka secara independen dan sesuai dengan keadaan zaman. Hal tersebut dapat ditemukan dalam pemikiran Kartini, di mana ia menyebutkan akan pentingnya pelajaran kesehatan bagi perempuan-bukan hanya karena saat itu belum ada perempuan yang menjadi dokter- karena kondisi lingkungan sekitar. Pada akhir abad ke-19, wabah kolera menyerang Hindia Belanda (Indonesia), hal tersebut menyebabkan lahirnya pemikiran Kartini tentang pentingnya ilmu kesehatan. sebagaimana ia tuliskan:

“Saya telah banyak mengunjungi penderita di tempat tidurnya. Bahkan semasih anak-anak sudah dan dapat turut berbicara mengenai itu. Pada salah satu tempat tidur berita itu timbul pikiran pada diri saya untuk minta pelajaran dalam perawatan orang sakit...saya akan membela bagaimana pentingnya mengetahui tentang ilmu kesehatan, susunan tubuh manusia dan lain-lain untuk kaum perempuan. Saya ingin agar hal itu dimuat dalam rencana pelajaran sekolah-sekolah yang akan didirikan untuk anak-anak perempuan Bumiputra” (Kartini, 1979: 99).

Sama halnya dengan Kartini, Dewi Sartika juga menekankan pentingnya adanya keterkaitan antara keadaan zaman dan pendidikan. Dewi Sartika berpendapat bahwa perempuan harus dapat mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi perempuan selalu mengalami perubahan, termasuk mengenai pendidikan. (Sartika, 2020: 65). Hal tersebut terlihat dari bagaimana ia-sama halnya dengan Kartini- juga menekankan pentingnya ilmu kesehatan yang dapat dilihat dari didekasikannya satu bab dalam bukunya untuk membahas tentang kesehatan, utamanya karena ia saat itu hidup di masa yang sama dengan Kartini, sehingga keadaan lingkungan sekitar -dalam hal ini wabah kolera- tidak jauh berbeda. Selain itu, Dewi Sartika juga menekankan pentingnya pendidikan untuk menyesuaikan dengan zaman, yang

ia tuliskan sebagai berikut: “Padahal selain dari itu (yang pokok), masih banyak lagi pendidikan yang diperlukan untuk keutamaan manusia hidup”. (Sartika, 2020: 83)

Pemikiran Kartini dan Dewi Sartika tentang kaitan antara pendidikan dan perkembangan zaman tidak sepenuhnya hilang dalam kebijakan pemerintah pada periode I kepresidenan Joko Widodo. Pada mas ini, pendidikan kejuruan tidak difokuskan kepada kejuruan perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi zaman yang menuntut perempuan untuk lebih ikut campur tangan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pendidikan kejuruan bersifat lebih general, yaitu tidak hanya terbatas kepada keterampilan perempuan seperti memasak, menjahit, dan merenda. Perempuan tidak lagi diharapkan untuk sekolah di sekolah kejuruan kewanitaan/keputrian, melainkan di sekolah kejuruan umum. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi pergeseran peran perempuan secara sosio-kultural, yaitu dari sektor domestik menjadi publik. Perempuan tidak hanya dituntut untuk mempelajari keterampilan kewanitaan, melainkan keterampilan bidang kejuruan secara umum yang tidak lagi dibatasi oleh gender.

KESIMPULAN

Pendidikan kejuruan di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu, di mana setiap periode memiliki coraknya masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan kejuruan perempuan yang dipelopori oleh Kartini dan Dewi Sartika- meski hanya berupa keterampilan dasar merupakan pertanda adanya pergeseran peran perempuan, yaitu tidak lagi hanya berkecimpung dalam ranah domestik, tetapi sudah mulai memasuki ranah publik. Sejak kemerdekaan, pendidikan kejuruan di Indonesia semakin bersifat general dan tidak lagi hanya mencakup pendidikan dasar bagi perempuan seperti keterampilan menjahit, memasak, dan merenda layaknya masa-masa sebelumnya. Meningkatnya fokus pemerintah terhadap pendidikan kejuruan menyebabkan perempuan mendapatkan pendidikan keterampilan yang sama dengan laki-laki sebagaimana dapat dilihat dari tingginya jumlah siswa perempuan yang menempuh Pendidikan di SMK. Hal tersebut semakin menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan dari sektor domestik ke publik, di mana perempuan tidak lagi sekolah hanya untuk mendapatkan pendidikan keterampilan untuk menjadi Ibu rumah tangga, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga Kerja pada sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Angelino, A.D.A. De Kat. (1931). Colonial Policy Volume II The Dutch Indies . Leiden: Martinus Nijhoff.
- Arbaningsih, Dri. (2005). Kartini dari Sisi Lain: Melacak Pemikiran Kartini tentang Emansipasi “Bangsa”. Jakarta Selatan: Penerbit Buku Kompas
- Aryono. (2017) “Buku Kartini dalam Beragam Bahasa Buku kumpulan surat-surat Kartini diterbitkan dalam beragam bahasa”.
- Daryono, Yan. (2008). Dewi Sartika Sang Perintis. Cetakan ke-2; Yayasan AWIKA & PT. Grafitri Budi Utami,
- Furnivall, JS. (2010). *Netherlands India A Study of Plural Economy*. New York: Cambridge University Press.
- Gottschalk, Louis.. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, Terj. Nugroho
- Koentjaraningrat (Penyunting). (1984). Manusiadan Kebudayaan di Indonesia. Cetakan ke- 9; Jakarta: Djambatan.
- Hadam, Sampun, dkk. 2017. *Implementasi Revitalisasi SMK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hamalik, Oemar. 2007. Cetakan ke-2; *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartini, Raden Adjeng. 1979. Surat-Surat Kartini Renungan Tentang dan Untuk Bangsanya. Terjemahan: Sulastin Sutrisno. Jakarta: Djambatan.
- Khurniawan, Arie Wibowo. 2015. *SMK dari Masa ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Makmur, Djohan, dkk. (1993). *Sejarah Pendidikan Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: CV. Manggala Bhakti.
- Nasution, S. (2014). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Reksanagara, Kardinah. (1958).Tiga Saudara Kartini Roekmini Kardinah. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- Rifa’I, Mohammad. 2020. *Sejarah Pendidikan Nasional dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sartika, Dewi. 2020. Kautamaan Istri. Terjemahan: Chye Retty Isnended dan Nugraha Soekari. Bandung: Situseni.

Soekiman, Djoko. (2014). Kebudayaan Indis dari Zaman Kompeni sampai Revolusi. Depok: Komunitas Bambu.

Thompson, John. F. 1973. *Foundations of Vocational Education: Social and Philosophical Concepts*. New Jersey: Prentice Hall.

Wiriaatmadja, Rochiati. (1986). Dewi Sartika. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Jurnal:

Melmambessy Moses, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.", *Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol. 12. No. 1, 2012. [online] <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/mrbm/article/view/1103>, diunduh pada 12 April 2021.

Purwanto & Sukardi, T." Pengelolaan Bengkel Praktik SMK Teknik

Pemesinan di Kabupaten Purworejo". *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 22 No. 3, 2015. [online] <https://journal.uny.ac.id/index.php/jptk/article/view/6836>, diunduh pada 12 April 2021

PDF:

Badan Pusat Statistik. "Statistik Indonesia 1997". PDF. (<https://www.bps.go.id/publication/1998/07/01/86c5d063774a2324df8bc65c/statistik-indonesia-1997.html>, diunduh pada 17 April 2021)

Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2017". PDF. (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/11/06/1377/agustus-2017--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-->, diunduh pada 10 April 2021)

Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018". PDF. (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html>, diunduh pada 10 April 2021)

Badan Pusat Statistik. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019". PDF. (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>, diunduh pada 10 April 2021)

Biro Pusat Statistik. "Statistik Indonesia 1986". PDF. (<https://www.bps.go.id/publication/1987/01/19/e8e41f6313e54cadcf96843e/statistik-indonesia-1986.html>, diunduh pada 17 April 2021)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. "Indonesia Educational Statistics in Brief 2016/2017. PDF. (http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_525ACC29-BCEE-432D-8BB2-194BCCAE107E_.pdf, diunduh pada 6 April 2021).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. "Indonesia Educational Statistics in Brief 2017/2018. PDF. (http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_FBB7E3E1-3F01-49E6-B1BC-E1DA8E608D33_.pdf, diunduh pada 6 April 2021).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. "Indonesia Educational Statistics in Brief 2018/2019. PDF. (http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_FBB7E3E1-3F01-49E6-B1BC-E1DA8E608D33_.pdf, diunduh pada 6 April 2021).

Internet:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Laporan Hasil Ujian Nasional". (https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/#2015-2016-2017-2018-2019!smp!capaian_nasional!99&99&999!T&T&T&T&1&T!&, diunduh pada 8 April 2021)